

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disrupsi besar telah mengguncang dunia sejak awal tahun 2020 ketika sebuah virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok di akhir tahun 2019 menyebar ke berbagai negara secara masif. Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) mendeklarasikan status COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga saat ini, status tersebut belum dicabut—sebagian besar negara masih mewajibkan penerapan protokol kesehatan (seperti penggunaan masker) dan pembatasan sosial dalam skala besar. Beberapa negara memang sudah melonggarkan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, misalnya di Singapura yang mengizinkan warganya beraktivitas di luar ruangan tanpa masker per 29 Maret 2022 (U-Wen, 2022; dalam situs web The Business Times Singapore), Amerika Serikat yang berencana mengizinkan aktivitas dalam ruangan tanpa masker (Steenhuysen, 2022; dalam situs web Reuters), mulai dihapusnya syarat untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 ketika ingin bepergian, dan lain sebagainya. Meski demikian, memulihkan sektor-sektor yang telah diguncang oleh pandemi sejak 2 tahun lalu tetap akan memerlukan waktu.

Pandemi COVID-19 “memaksa” masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, mengurangi aktivitas di ruang publik, bahkan mengganti “simbol-simbol” yang biasa mereka gunakan (misalnya jabat tangan yang bermakna sebagai “salam” tidak boleh lagi dilakukan, sehingga masyarakat menggantinya dengan gestur lain yang minim/tidak melibatkan kontak fisik). Tindakan ini kemudian turut mengubah setting sosial yang dihadapi oleh masyarakat, berikut dengan bidang-bidang yang berkaitan dengannya, misalnya semakin sedikit orang di pusat perbelanjaan, tetapi kurir *e-commerce* semakin banyak berseliweran di jalanan, atau ramainya percakapan dan interaksi sosial yang terjadi dalam video *live-streaming* di berbagai *platform* yang partisipannya adalah orang-orang dari berbagai negara yang berjauhan di mana hal tersebut hampir mustahil di dunia nyata, dan masih

banyak lagi. Terlebih lagi, ketika berbagai upaya pencegahan penyebaran virus tersebut diimplementasikan dalam kebijakan daerah/negara, hal yang dipengaruhi akan lebih banyak dan besar lagi serta “mau tidak mau” dilaksanakan karena terjamin oleh adanya peraturan/undang-undang sah. Regulasi biasanya diterapkan di berbagai sektor atau ruang publik misalnya kantor pemerintahan, mall/pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan juga terminal transportasi umum seperti bandar udara.

Bandar udara (selanjutnya akan disebut sebagai “bandara”) merupakan tempat pemberangkatan maupun perhentian bagi transportasi udara seperti pesawat terbang, baik pesawat umum/komersial maupun pribadi. Meningkatnya mobilitas global dan interkoneksi antar negara-negara di dunia didukung oleh adanya bandara, di mana hampir seluruh perjalanan internasional akan ditempuh melalui bandara sebagai pintu gerbang menuju berbagai belahan dunia (khususnya bandara bertaraf internasional). Namun, kondisi demikian terdisrupsi melalui terjadinya pandemi COVID-19 di negara-negara di dunia. Mobilitas menjadi sesuatu yang dibatasi—bahkan dilarang—sebagai upaya pemerintah berbagai negara untuk menekan angka warganya yang terjangkit COVID-19. Perubahan kondisi yang drastis demikian membawa kesulitan bagi bandara (Sun, 2021), sehingga bandara harus melakukan beberapa kebijakan untuk tetap bertahan, misalnya efisiensi dan restrukturasi.

Bidang pelayanan (*service*) merupakan bidang yang sangat penting bagi bandara, sebab dunia penerbangan bukan soal transportasi belaka, akan tetapi juga pengalaman personal individu khususnya ketika menerima pelayanan dari suatu badan jasa adalah hal yang juga penting diperhatikan (Lemon dan Verhouef, 2016), hal inilah yang disebut sebagai “*airport experience*”. Batouei, *et al.* (2020) menyebutkan bahwa “*airport experience*” calon penumpang pesawat terbang begitu penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna fasilitas bandara (calon penumpang pesawat) sehingga angka kunjungan bandara tidak menurun karena layanan yang buruk. Dari segi bisnis, bandara dapat bersaing dan terpilih menjadi tempat transit bagi para penumpang beberapa penerbangan jarak jauh. Bahkan,

dampaknya bagi daerah di mana bandara tersebut berada adalah pertumbuhan dan pengembangan daerah sebagai destinasi wisata (Bezerra & Gomes, 2020; Cheung, *et al.*, 2020; Loh *et al.*, 2020; Seetanah, *et al.*, 2020 dalam Batouei *et al.*, 2020). Di masa pandemi, peran bandara dalam mengatur mobilitas masyarakat untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 di berbagai daerah sangat penting, dan mereka yang bekerja di dalamnya yang berperan besar dalam hal ini—meskipun proses antisipasi ini, khususnya secara materiil, akan “merugikan” mereka.

Bandara dan dunia penerbangan secara keseluruhan tidak hanya dapat mengandalkan pegawai yang bekerja “di udara” seperti pilot dan pramugari, akan tetapi juga mereka yang bekerja untuk melayani penumpang pesawat selama berada di darat (bandara). Ketika situasi pandemi melanda dunia dan mengharuskan industri maskapai dan bandara untuk beradaptasi sekaligus mengalami kondisi krisis akibat penurunan drastis angka penerbangan pesawat udara, yang terdampak tidak hanya pegawai maskapai, tetapi kondisi serupa juga dihadapi oleh petugas bandara yang mengalami perubahan cara kerja, perubahan jumlah upah, bahkan perubahan status kepegawaianya, di mana bandara terbilang sedang dalam kondisi krisis—pemasukan turun drastis di saat pengeluaran harus ditambah, salah satunya karena penyesuaian-penyesuaian dengan protokol kesehatan.

Bandara sebagai industri jasa yang juga memiliki orientasi keuntungan bekerja sama dengan jasa penyedia tenaga kerja kontraktual untuk memperkecil pengeluaran SDM. *Outsourcing* (Bahasa Indonesia: alih daya) merupakan tenaga kerja yang direkrut dari jasa penyedia (*supplier*) yang berasal dari luar internal (struktur organisasi) suatu perusahaan barang/jasa. *Outsourcing* bukanlah hal yang baru di dunia industri, akan tetap pelaksanaannya yang legal di Indonesia sendiri baru diresmikan di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnopoetri. Keberadaan *outsourcing* sebagai tenaga kerja temporer dan tidak tetap dari suatu perusahaan merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai *precarious work*, yakni pekerja tidak tetap yang “rentan” karena jaminan dan perlindungan kerja yang ia miliki tidak sebanyak dan seaman yang dimiliki oleh pegawai tetap. Menurut Kalleberg (2011) dan Vosco (2010) dalam Duvisac (2018), permintaan akan tenaga

kerja fleksibel dan yang lepas dari struktur dalam industri semakin meningkat karena adanya perubahan dalam aktivitas perekonomian secara makro, seperti semakin intensnya kompetisi, naiknya biaya-biaya, dan menurunnya profitabilitas (kesempatan untuk mendapat keuntungan lebih) dan relasi sosial dalam serikat kerja. Kondisi yang dialami oleh pekerja akan senantiasa mendapat pengaruh dari 3 “pilar”, yakni negara, masyarakat, dan pasar (Pang, 2018).

Hukum mengenai pegawai *outsourcing* diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Ketentuan terbaru mengenai *outsourcing* memungkinkan pegawai yang bekerja dengan sistem ini untuk ditempatkan di lebih banyak lagi bidang/posisi pekerjaan¹ dibanding dengan peraturan yang sebelumnya (UU Ketenagakerjaan Tahun 2003) termasuk di ranah operasional organisasi. Hal ini memungkinkan pegawai *outsourcing* untuk mengerjakan pekerjaan yang bebannya sama dengan yang dimiliki oleh pegawai tetap, tanpa merasakan hak yang dimiliki oleh pegawai tetap. Akibat dari hal ini, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai *outsourcing* telah terjadi berkali-kali di Indonesia. Terlebih di masa pandemi ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan bahwa di antara 20.000-an pegawai *outsourcing* yang diputuskan hubungan kerjanya masih ada yang tidak memperoleh haknya sebagai pekerja. Ancaman yang dihadapi oleh pegawai *outsourcing* antara lain perubahan sistem kerja yang akhirnya menurunkan pendapatan mereka secara signifikan (misalnya sistem *on-call* atau bekerja hanya ketika memperoleh panggilan dari perusahaan pengguna jasa) ataupun juga adanya anggapan bahwa kesejahteraan pegawai *outsourcing* adalah sepenuhnya tanggung jawab perusahaan penyedia *outsourcing*.

¹ Masih menjadi polemik apakah hukum/ketentuan terbaru mengenai *outsourcing* telah sepenuhnya meniadakan batas pekerjaan apa saja yang boleh diisi oleh tenaga yang di-*outsourcing*. Baik UU Cipta Kerja maupun PP No. 35 Tahun 2021 tidak menyebutkan adanya pembatasan kerja yang boleh dialihdayakan seperti UU sebelumnya, akan tetapi terdapat Permenaker No. 11 Tahun 2019 yang mengatur pembatasannya dan kedua ketentuan terbaru tersebut disebutkan tidak menghapus/membatalkan ketentuan yang diatur Permenaker tersebut (Nugroho, 2021; dalam siplawfirm.id)

Pandemi telah menyebabkan kerugian dan perubahan besar dalam sektor-sektor yang banyak mempekerjakan tenaga *outsourcing* seperti ritel, pusat pemberlanjaan, dan tak lain halnya dengan bandara. Hal ini akan membuat kehidupan mereka yang sejak awal sudah rentan menjadi semakin rentan, bahkan mencapai titik “*collapse*” ketika imbas dari adanya krisis tersebut sudah tidak dapat dihadapi lagi oleh mereka yang mengalaminya. Martilla-Santander dkk (2021) dalam artikelnya menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan semakin banyaknya pekerja—baik pekerja formal maupun informal—menjadi pekerja yang “prekariat”, sementara mereka yang sejak awal statusnya adalah pekerja prekariatpun menjadi “semakin prekariat”. Kondisi krisis yang ada dapat membuat suatu industri terpaksa tidak bisa melindungi hak-hak pekerja *outsourcing* yang telah diatur sedemikian rupa karena perusahaan sendiripun sedang sulit untuk bertahan dan tetap beroperasi dengan profit yang menurun akibat kurangnya konsumen. Apalagi, posisi *outsourcing* yang berada di luar struktur organisasi membuat mereka memiliki posisi tawar yang rendah dan paling mudah “disingkirkan” ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan industri untuk bertahan (misalnya efisiensi SDM) harus dilakukan.

Penelitian ini berusaha menguraikan fenomena pandemi COVID-19 beserta krisis yang diakibatkannya sebagai isu sosial. Fenomena ini akan diamati dari sudut pandang mereka yang memiliki pengalaman sebagai salah satu pihak rentan yang terancam kestabilan hidupnya. Kerentanan tersebut ada karena status mereka yang tidak tetap dan mantap sebagai tenaga yang diambil dari luar struktur, dan bagaimana status dan peran mereka tersebut membuat mereka menjadi “fleksibel” dalam artian dapat dipanggil/diputus hubungan kerjanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana pengalaman pekerja *outsourcing* selama bekerja di bandar udara yang sedang ditimpa krisis ekonomi dan struktural—ketika status/posisinya sendiri sejak sebelum pandemi pun sudah terbilang rentan. Aspek yang akan digali secara khusus dari pengalaman subyek penelitian antara lain adalah 1.) aktivitas yang

dijalani pekerja *outsourcing* di masa pandemi baik dalam pekerjaan maupun hubungan kerja yang mereka jalin; dan 2.) pengalaman adaptasi pekerja *outsourcing* untuk bertahan di masa pandemi. Penelitian ini mempelajari krisis akibat pandemi sebagai suatu fenomena sosial yang dipahami melalui pengalaman serta intersubyektifitas yang dimiliki oleh pegawai *outsourcing* dalam lingkup kehidupan kerjanya.

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap pengalaman pekerja *outsourcing* di lingkungan bandar udara ketika bekerja di tengah kondisi pandemi COVID-19
2. Untuk memahami adaptasi yang dilakukan oleh para pekerja *outsourcing* bandar udara ketika lingkungan kerjanya terkena dampak pandemi COVID-19.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai literatur yang dapat memperkaya studi sosiologi industri relevansinya dengan konteks krisis
 - b. Sebagai literatur yang dapat membuka wawasan mengenai kehidupan kelompok masyarakat urban yang rentan dan terancam di tengah kondisi krisis akibat pandemi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pembuat dan penyelenggara kebijakan
Sebagai literatur acuan yang dapat membantu perancangan sistem kerja serta program/kebijakan yang terkait dengan lebih tepat guna dan efektif.
 - b. Bagi penulis
Sebagai proses belajar untuk mengasah kemampuan meneliti dan menganalisis secara ilmiah pengalaman/fenomena yang dihadapi oleh masyarakat serta bagaimana mereka menanggapinya.

1.3. Kerangka Konseptual

A. Studi Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh studi-studi ilmiah ilmu sosial yang telah dilakukan dan dipublikasi terlebih dahulu. Studi pertama oleh Loustaunau dkk dengan judul artikel **“No Choice but to Be Essential: Expanding Dimensions of Precarity During COVID-19”** merupakan studi yang dimulai pada tahun 2019 dan subyek penelitiannya adalah pekerja yang berpenghasilan rendah dan kontrak kerjanya cenderung pendek serta dapat diakhiri dengan mudah secara sepihak. Unsur ketidakpastian dalam pekerjaan mereka bukanlah semata karena “karakteristik” pekerjaannya, akan tetapi merupakan hasil dari lemahnya penerapan hukum yang menegakkan hak mereka sebagai pekerja, sehingga mereka menjadi pekerja yang rentan. Di tengah masa penelitian, COVID-19 melanda dan ditemukan bahwa keberadaan virus ini sebagai pandemi membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan pekerjaan para pekerja tersebut—yang sejak awal sudah rentan menjadi semakin rentan. Pertama, aspek kesehatan menjadi aspek “baru” dalam kondisi kerentanan yang dialami, yang kemudian menghasilkan gejala kecemasan. Perasaan cemas takut tertular virus, dan kecemasan yang sudah ada sebelumnya akan cukup atau tidaknya penghasilan, ditambah kebutuhan yang semakin banyak untuk menjaga diri dan keluarga agar tetap sehat, menjadi “kondisi kerja” yang dialami oleh para pekerja ini. Kekhawatiran akan kondisi kesehatan yang dialami para pekerja tersebut juga diakibatkan oleh sangat terbatasnya akses mereka kepada fasilitas kesehatan (bagi mereka dan keluarga mereka khususnya anak-anak) yang terjangkau bagi mereka. Selain itu, tekanan juga mereka dapatkan dari pelanggan yang menolak untuk mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan di tempat subyek bekerja, bahkan hingga memberi mereka perlakuan buruk.

Pandemi COVID-19 sebagai fenomena sosial yang dibahas dalam penelitian ini didukung oleh artikel jurnal yang berjudul **“Pandemic Rage: Everyday Frustrations in Times of COVID-19 Crisis”** oleh Kubacka dkk yang diterbitkan pada tahun 2021. Pandemi dianggap sebagai sesuatu yang

menyebabkan perubahan atau guncangan pada “*spatial order*” yang mengacu kepada adanya tekanan sosial (*social compression*) dalam “ruang” atau konteks di mana mereka berada dan berinteraksi berikut dengan fakta di mana tekanan ini merupakan pengalaman bersama yang dialami oleh masyarakat global di abad ke-21. Selain itu, pandemi jugalah merupakan sesuatu yang memengaruhi kondisi emosional mereka yang mengalaminya. Misalnya, krisis akibat pandemi sempat menyebabkan kekurangan barang-barang pokok yang dapat menyebabkan frustrasi hingga konflik sosial. Namun, adanya krisis juga dapat menumbuhkan simpati, solidaritas, dan altruisme sehingga masyarakat dapat saling memahami satu sama lain (Weber, 1978). *Order* dan emosi adalah 2 hal yang sifatnya resiprokal, yang oleh Kubacka dkk disebut sebagai “*pandemic rage*”. Pandemi merupakan fenomena yang dianggap lebih penting untuk dipahami melalui interpretasi masyarakat akan fakta yang beredar, daripada melalui fakta itu sendiri.

Selanjutnya, penelitian oleh Atte Vieno (2021) berjudul “**‘Airport People’ in Transformation: Vertical Disintegration and the Reconfiguration of Occupational Belonging in Terminal Work at Helsinki-Vantaa International Airport**” menjelaskan bandara sebagai lokasi kerja (*workplace*) bagi individu-individu dari beberapa kelompok generasi (generasi tua yang direkrut langsung oleh perusahaan; generasi muda yang direkrut dengan sistem *outsourcing*) dan bagaimana restrukturasi (dalam hal ini keberadaan sistem *outsourcing*) memiliki dampak signifikan terhadap relasi yang selama ini terjalin dalam lokasi kerja tersebut. Relasi merupakan sesuatu yang dijalin antar pekerja untuk mempertahankan keberlanjutan karier (dan lebih lanjut, kehidupan mereka masing-masing) di tengah sistem bekerja yang semakin mengutamakan fleksibilitas (dan berimplikasi kepada ketidakpastian/kerentanan).

Manolchev (2019) dengan artikel penelitiannya yang berjudul “**Sensemaking as ‘Self’-defence: Investigating Space of Resistance in Precarious Work**” berusaha memandang kondisi ketidakpastian yang dialami oleh pekerja prekariat tidak semata-mata sebagai kondisi yang sepenuhnya ditanggapi secara “pasrah”

oleh mereka dalam kesengsaraan, akan tetapi sebagai sesuatu yang walaupun rumit dan menekan mereka, mereka dapat “mempelajari” pengalaman bekerja tersebut setiap harinya, dan mengambil makna-makna bahkan yang “membangun” mereka—pada akhirnya, mereka tetap menjadi “pemain utama” dalam karier mereka sendiri di samping kenyataan bahwa mereka bekerja dengan sistem yang memarginalkan mereka. Daripada melihat usaha/perlawanan pekerja terhadap sistem yang menekan mereka dalam bentuk demonstrasi, mogok, atau aksi-aksi “revolusioner” semacamnya, penelitian ini lebih mengamati tindakan resistensi, “perlawanan” kecil-kecilan yang tidak dapat diidentifikasi sebagai perlawanan yang dimanifestasikan dalam keseharian kerja mereka. Fakta bahwa sistem kerja di dunia yang memiliki kecenderungan neo-liberalistis menekan dan menggerogoti hak pekerja, dinyatakan oleh Manolchev, tetap tidak bisa diabaikan. Namun, layaknya kondisi krisis yang mendorong masyarakat menjadi reflektif (Beck, 1992), para pekerja prekariat juga merefleksikan pengalaman mereka dan memaknainya sedemikian rupa (bahkan secara positif), sehingga mereka dapat memberikan perlindungan (atau lebih tepatnya kekuatan) untuk bertahan dalam pekerjaan yang mereka lakukan.

Bhatasara (2017) dalam studinya yang berjudul **“Towards a Sociology of Adaptation to Rainfall Variability in Rural Zimbabwe: The Case of Charewa in Mutoko”** meneliti adaptasi yang dilakukan oleh petani dari sudut pandang sosiologi. Teori reflektivitas dan morfogenesis Margaret Archer digunakan untuk menganalisis proses adaptasi para petani yang berangkat dari reflektivitas mereka terhadap variasi curah hujan yang ada—di mana peneliti mengidentifikasi variasi curah hujan tersebut sebagai “morfogenesis”. Dari reflektivitas yang mereka miliki, beragam bentuk adaptasi/tindakan diambil oleh para petani. Mengubah strategi bertani, memperluas dan memanfaatkan jaringan sosial, atau bahkan tidak melakukan apa-apa merupakan berbagai aktivitas yang mencerminkan bagaimana petani secara reflektif memandang tantangan yang datang dari perubahan kondisi alam tersebut.

Studi ini juga didukung oleh artikel “**Kerentanan Pekerja Imaterial dalam Industri Komersialisasi Vlog**” oleh Pratitis (2017) yang meneliti pekerja imaterial sebagai pekerja yang rentan. Pekerja imaterial merupakan pekerja yang hasil kerjanya bukan merupakan barang fisik, misalnya adalah seperti pekerja yang memberikan jasa berupa pelayanan yang ramah dan nyaman dan juga pekerja yang mereproduksi simbol di media massa. Pekerja imaterial yang tidak bertanggung jawab secara langsung dalam produksi konten dalam kasus yang diteliti di sini merupakan pekerja yang memiliki posisi rentan di dalam struktur karena tidak memiliki ikatan kontrak yang jelas dengan perusahaan, ketiadaan jaminan peningkatan *skill* dan penghasilan, dan kerentanan lainnya. Terdapat pula ketimpangan sosial yang terjadi dalam ruang kerja pekerja imaterial, baik dengan pihak manajemen (lemahnya posisi/status sosial pekerja), maupun dengan sesama pekerja yang mengerjakan bidang produksi/pekerjaan inti perusahaan (kontrak lebih jelas, memiliki posisi tawar lebih tinggi, dan sebagainya).

Studi lain yang mendukung penelitian ini adalah “**Precarization and Labor Resistance: Canada, the USA, India and China**” oleh Chan dkk. (2019). Artikel ini menjelaskan pengalaman pekerja tidak tetap di 5 negara. “Populer”-nya sistem subkontrak dalam merekrut pekerja terbukti memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat dan kelompok pekerja. Perekrutan pekerja dengan kontrak singkat merupakan dampak dari tekanan adaptasi budaya bisnis global yang bergerak menuju sistem neo-liberal. Sistem ini membawa kerugian baik secara material dan sosial kepada para pekerja tidak tetap, sehingga untuk bertahan mereka melakukan tindakan resistensi.

Studi mengenai dampak keberadaan COVID-19 terhadap operasional transportasi umum khususnya di negara berkembang diterbitkan dalam artikel “**Dealing with impact of COVID-19 on transportation in a developing country: Insights and policy recommendations**” (2022) oleh Mogaji dkk. Masalah kesiapan moda transportasi umum di negara berkembang dinilai belum begitu diantisipasi. Kebijakan mengenai hal ini mungkin memang diatur, akan

tetapi setiap badan belum dapat sejalan dalam pelaksanaannya bahkan membuat regulasi yang berbeda-beda. Pandemi yang datang dengan mendadak ditambah moda transportasi umum yang belum siap menghadapi hal ini menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap biaya transportasi (untuk membiayai fasilitas yang menyokong praktik protokol kesehatan), penurunan pendapatan karena semakin sedikitnya penumpang, dan kestabilan finansial dari perusahaan penyedia/penggerak transportasi umum tersebut. Baik pengguna/penumpang maupun penggerak (orang-orang yang bekerja di badan transportasi umum tersebut, misalnya sopir) sama-sama merasakan kesulitan; pengguna transportasi umum merasa kebutuhan akan rasa amannya kurang dapat dijamin karena kurangnya fasilitas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sementara para sopir merasakan bahwa pendapatannya menurun dan kurang produktif akibat dari sedikitnya pemasukan yang didapatkan dari penumpang.

Selanjutnya, studi tahun 2021 yang berjudul **“COVID-19 Pandemic and Air Transportation: Successfully Navigating the Paper Hurricane”** oleh Sun dkk. melihat dampak keberadaan pandemi COVID-19 pada transportasi udara (pesawat terbang komersial) dan bagaimanaantisipasi yang dilakukan. Moda transportasi udara dinilai sebagai salah satu transportasi yang paling berisiko untuk “mendukung” transmisi COVID-19 karena merupakan kendaraan yang sepenuhnya menutup sirkulasi udara dari luar dan biasanya akan terbang dalam waktu yang relatif lama, serta beberapa pesawat menempuh jarak yang melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu, bandara merupakan terminal transportasi yang paling ketat pengawasannya, terutama akhir-akhir ini yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Kendati demikian, angka penumpang menurun drastis karena banyaknya akses masuk warga negara asing ke suatu negara/wilayah yang sebagian besar atau sepenuhnya ditutup. Berbagai perusahaan baik maskapai penerbangan maupun manajemen bandara menerapkan berbagai upaya untuk tetap menghasilkan, karena bagaimanapun juga, sebagai perusahaan keduanya akan tetap mengejar keuntungan. Studi ini melihat kesulitan yang tengah dihadapi akibat pandemi oleh bidang penerbangan

akan menjadi penggerak untuk peningkatan mutu fasilitas dan layanan bandar udara dan maskapai penerbangan, dengan berkembangnya teknologi serta konsep bisnis penerbangan di masa pandemi ini yang juga semakin menjamin keamanan dan kepercayaan penumpang.

Literatur terakhir yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah **“In, Against and Beyond Precarity: Work in Insecure Times”** oleh Alberti dkk. Yang diterbitkan pada tahun 2018 mengenai pengalaman dan persepsi pekerja tidak tetap ketika bekerja di kondisi yang tidak pasti dan tidak aman (*insecure*). Memiliki kecenderungan makro, analisis ini menyatakan bahwa kondisi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pekerja ini tidak hanya diakibatkan oleh pihak perusahaan atau manajemen, melainkan negara sebagai pihak yang berhak mengatur kebijakan dan implementasinya mengenai isu perlindungan sosial. Oleh karena itu, studi-studi ilmu sosial yang berkaitan dengan isu ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat menjawab permasalahan/realita mengenai keamanan/perindungan sosial terhadap pekerja di era kapitalisme kontemporer.

B. Teori dan Konseptualisasi

1. Konsep adaptasi dalam sosiologi

Adaptasi disinggung dalam topik penelitian ini (pengalaman di masa pandemi) karena perubahan kondisi serta kebijakan yang ada akibat pandemi menstimulasi perubahan cara dan pola subyek dalam menjalani aktivitasnya, sehingga hal ini menjadi pengalaman yang juga akan dibahas. Bahasan sosiologis mengenai adaptasi² merupakan hal yang penting karena relevansinya dengan dunia dan masyarakat yang semakin cepat berubah dan dinamis. Adaptasi sesungguhnya merupakan sesuatu yang sudah dilakukan

² Adaptasi yang dibahas di sini berbeda dengan “adaptasi sosial” yang merupakan bentuk penyesuaian individu terhadap nilai dan norma masyarakat, meski pada akhirnya masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya turut andil dalam proses adaptasi yang dilakukan oleh individu/kelompok terhadap kondisi baru yang mereka hadapi.

sedari dulu sebelum maraknya globalisasi. Segala produk budaya dari suatu masyarakat seperti tradisi, pengetahuan, teknologi/benda-benda, adat-istiadat merupakan hasil dari proses adaptasi terhadap kondisi eksternal (di luar suatu masyarakat) sehingga terjadi “perubahan internal” yang dihadapi dalam masyarakat (Korel, 1998). Adaptasi juga merupakan “resolusi” dari kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perubahan yang seringkali tidak bisa mereka ikuti dengan cara-cara yang lama, sehingga ia juga menjadi faktor obyektif yang mendukung terjadinya perkembangan masyarakat.

Konsep adaptasi dalam disiplin ilmu sosiologi pada mulanya diungkit oleh Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Spencer (1910) menyatakan bahwa integrasi sosial dapat terjadi ketika tercapainya keseimbangan antara organisme sosial dengan lingkungannya. Adaptasi bisa terjadi ketika seseorang—yang sudah “veteran”—pun—bisa mencapai keseimbangan sosio-psikologis dengan lingkungan sosialnya. Adaptasi menurut Durkheim berkaitan dengan penyesuaian yang dilakukan oleh individu terhadap norma sosial yang berlaku di masyarakat di mana ia berada. Menurut Durkheim, integrasi sosial sebagai bentuk adaptasi merupakan rasa ketergantungan individu yang kuat terhadap masyarakat, di mana ia belajar mengevaluasi dirinya menurut nilai yang “benar” untuk bisa memperhitungkan dirinya sebagai organ dari organisme—sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat.

Adaptasi menurut Robert K. Merton dikaitkan dengan anomie—yang menurut Merton (1938) merupakan “sesuatu yang berkembang dari ketidakselarasan (*disharmony*) antara tujuan masyarakat dengan cara-cara pencapaiannya yang sebelumnya dikenal dan selalu dipraktikan (*institutionalized*), yang oleh Merton disebut sebagai konformitas. Ketika masyarakat menghendaki pencapaian suatu tujuan dan cara yang telah mereka kenal dinilai tidak dapat membantu atau menghalangi hal tersebut, maka terjadilah suatu penyimpangan (*deviance*) dan kondisi ini disebut

sebagai ketegangan (*strain*). “Adaptasi” yang dilakukan masyarakat terhadap ketegangan tersebut antara lain adalah ritualisme (konformitas yang lebih ekstrim, sehingga tujuan tersebut diabaikan/ditinggalkan), inovasi (penggunaan cara baru yang sebelumnya ditentang, akan tetapi diterima di kemudian hari ketika terbukti berhasil membantu pencapaian tujuan), retreatisme (menolak cara yang ada serta meninggalkan tujuan; mengeksklusi diri/kelompok dari masyarakat), dan pemberontakan/*rebellion* (melawan cara yang ada dan memperkenalkan tujuan yang baru, dampaknya bisa positif atau negatif bagi masyarakat).

Talcott Parsons pada tahun 1950an membuat skema AGIL (*Adaptation, Goal-attainment, Integration, Latency*) yang menggambarkan keterkaitan antar sistem sosial, dalam teori besar struktural fungsional. Adaptasi sendiri menjadi salah satu aspek dalam skema ini, di mana ia memiliki pengertian sebagai reaksi masyarakat terhadap lingkungan mereka, dan mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan berikut dengan perubahan yang terjadi di dalamnya—dengan menyiapkan kebutuhan, material, komoditas, yang berkaitan dengan perubahan tersebut—dan mau tidak mau harus dilakukan agar masyarakat secara keseluruhan sebagai sistem tidak mengalami guncangan yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Lyudmila Vasilievna Korel (dalam Terzlev, 2019) merumuskan 6 poin penting tentang adaptasi dalam sosiologi:

- a. Konsep adaptasi digunakan untuk menunjukan proses di mana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan yang baru
- b. Proses adaptasi terlaksana untuk mencapai hasil dari proses tersebut, yang diharapkan oleh pelaku adaptasinya
- c. Adaptasi berkaitan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai masyarakat (misalnya bertahan hidup, memperoleh keuntungan materi, meningkatkan status sosial, dan lain sebagainya.)
- d. Kemampuan adaptasi menandakan kesesuaian antara tujuan dan hal yang telah dicapai melalui proses yang telah dilalui melalui aktivitas tertentu

- e. Adaptasi digunakan untuk mendefinisikan rasio keseimbangan (*equilibrium*) antara masyarakat dan lingkungannya
- f. Adaptasi juga merupakan proses yang tidak hanya menciptakan keseimbangan/ *equilibrium*, akan tetapi juga menciptakan kesempatan untuk berkembang/mencapai kemajuan.

Adaptasi merupakan proses yang komprehensif (menyeluruh), berkelanjutan, dinamis (dapat berubah sesuai keperluan), dan relatif stabil. Proses sosial ini bermanfaat sebagai usaha menciptakan kesesuaian antara suatu hal yang diperlukan/diinginkan pada suatu waktu/kondisi dengan kebutuhan serta kepuasan diri masyarakat. Proses adaptasi merupakan sesuatu yang bersifat sosial, sebab aspek sosial merupakan kriteria penting yang digunakan untuk mendefinisikan seorang individu. Oleh karena itu, yang disebut sebagai adaptasi dalam sosiologi menurut Korel (2005; dalam Fofanova dkk., 2020) adalah ketika sistem sosial (dalam hal ini adalah individu-individu, kelompok sosial, organisasi, komunitas, masyarakat, dan peradaban) melakukan penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal yang berdampak kepada pemahaman kolektif yang sudah ada dan mengakar sebelumnya terhadap perilaku, praktik sosial, nilai-nilai, refleksi informasi atau konstruksi-rekonstruksi realitas, dan struktur serta fungsi-fungsinya. Adaptasi diproses melalui interaksi yang aktif yang dilakukan oleh pelaku adaptasi dengan masyarakat sekitarnya, di mana hal tersebut akan berdampak kepada berkembangnya pola perilaku, nilai, norma, dan praktik yang baru, bahkan peninjauan kembali terhadap konstruksi realitas sosial (Fofanova dkk., 2020).

Korel (dalam Artemenko dan Ekaterina, 2020) membedakan adaptasi menjadi dua, yakni adaptasi dalam mental dan adaptasi dalam perilaku. Secara mental, proses adaptasi dapat meliputi asimilasi ide, nilai, dan norma yang baru, sedangkan adaptasi perilaku melingkupi praktik atau implementasi dari hal-hal tersebut dalam berperilaku dan berinteraksi. Kedua jenis adaptasi ini dapat berbenturan atau terjadi konflik, misalnya

ketika subyek dapat beradaptasi secara perilaku tapi belum secara mentalnya, atau sebaliknya.

2. Refleksivitas (Margaret S. Archer)

Adaptasi merupakan proses yang senantiasa berkembang, kompleks, dan reflektif (Bhatasara, 2017). Tindakan masyarakat—termasuk adaptasi—diwujudkan setelah melalui proses yang disebut sebagai refleksivitas. Keadaan obyektif bukanlah sesuatu yang akan ditangkap dan dipahami oleh manusia secara apa adanya, sebab peristiwa terjangkau oleh manusia secara empiris melalui pengalaman (Scambler, 2012). Refleksivitas merupakan variabel penengah antara bentuk-bentuk pengkondisian struktural yang dihadapi oleh individu dengan hasil refleksivitas yang muncul darinya, tergantung dengan bagaimana proses/jenis refleksivitas yang diterapkan individu ketika berinteraksi dengan sesamanya (Donati, 2011). Kenyataan bahwa manusia/masyarakat tidak meinternalisasi apa yang mereka terima dari luar secara “mentah-mentah” menunjukkan bahwa mereka—sebagai agen dalam struktur—memiliki kekuatan (*power*) dalam membentuk pemikiran mereka sendiri atas kondisi struktural yang mereka hadapi, di mana pemikiran tersebut akan diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang dapat mereka ambil.

Margaret Scotford Archer merupakan seorang profesor Sosiologi beraliran realisme kritis di Universitas Warwick, Britania Raya, dan pernah menjabat sebagai presiden dari International Sociological Association. Dalam bukunya yang berjudul “Making Our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility”, ia mendefinisikan refleksivitas sebagai “latihan teratur kemampuan mental orang-orang normal³ untuk memahami

³ Yang dimaksud dengan orang-orang “normal” di sini berhubungan dengan kecenderungan dan kebiasaan manusia pada umumnya (kecuali yang mengalami penyakit psikologis yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan memahami sekitarnya) untuk berkomunikasi, membuat pertimbangan, dan memproyeksikan keinginan yang dilakukan di dalam benaknya sendiri.

diri mereka sehubungan dengan konteks sosialnya dan demikian sebaliknya”. Lebih lanjut, reflektivitas bukan hanya soal proses mediasi yang dilakukan individu terhadap dampak-dampak dari dunia sosial terhadapnya, akan tetapi juga responnya terhadap dampak sosial tersebut. Melalui reflektivitas, individu memantapkan identitas personal dan identitas sosialnya, berdasarkan apa yang menjadi prioritas dari individu tersebut dan identitas tersebut akan mengarahkan tindakan individu sesuai apa yang menjadi tujuannya di tengah perubahan kondisi/sosial yang berlangsung. Teori reflektivitas yang ditawarkan Archer memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan beragam pengalaman hidup dari individu-individu yang menghadapi situasi sosial yang serupa (Golob dan Makarovic, 2019).

Archer mengkritisi teori-teori sosiologi yang membahas hal terkait reflektivitas dan tindakan masyarakat yang dicetuskan sosiolog/ilmuwan lain. Menurutny, beberapa teori sosiologi yang berusaha menjelaskan reflektivitas tersebut berasumsi bahwa kondisi struktur dan kultur yang menimpa aktor/masyarakat akan diresponi oleh mereka dengan cara yang sama. Archer menilai bahwa teori-teori tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai apa yang penting untuk diprioritaskan dan dijadikan tujuan dalam suatu periode terjadinya/berubahnya sesuatu dalam kehidupan sosial mereka. Contohnya, teori dalam aliran neo-Marxisme yang berasumsi bahwa aktor bertindak dan berusaha mencapai kelas sosial yang tinggi untuk mencapai tujuannya yang disebut sebagai “*vested interest*”, yakni suatu tujuan yang secara kolektif (oleh seluruh masyarakat di berbagai kelas sosial) sebagai sesuatu yang berharga dan prestisius apabila mencapainya. Contoh lain adalah teori pilihan rasional yang masih beraliran ekonomi yang berasumsi bahwa masyarakat bertindak untuk mencapai tujuan yang telah diperhitungkan dari segi ongkos dan keuntungan ekonomis yang dapat diberikan (*cost-benefit*). Hal ini dianggap sebagai pengabaian terhadap aspek sosial dari masyarakat dan keberagaman karakteristik yang mereka

miliki, dan menurut Archer juga dapat membuat analisis sosiologi hanya sebatas mengetahui apa yang paling sering dipikirkan dan dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat secara umum.

Archer berargumen bahwa meski terjadinya suatu guncangan/ketegangan struktur adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal kebenarannya, dan secara objektif dapat dilihat pengaruhnya terhadap aspek-aspek pokok bagi kehidupan masyarakat, aktor akan tetap memahami kondisinya secara subyektif, dan bertindak berdasarkan pehaman subyektifnya tersebut. Sesuatu yang bukan prioritas/tujuan bagi seorang aktor—bahkan mungkin secara negatif dipandang sebagai sesuatu yang “sia-sia”, kurang dapat membantu untuk bertahan hidup, atau bahkan pemborosan—bisa menjadi sesuatu yang sangat penting, berharga (*sacred*) bagi aktor lainnya yang menghadapi kondisi serupa. Dari argumen inilah Archer mengemukakan model 3 tahap (2007) yang menunjukkan atau menandai proses refleksivitas, antara lain:

- a. Terdapat aspek struktural dan kultural yang secara obyektif membentuk konteks di mana individu (subyek) bertindak
- b. Subyek memiliki suatu/beberapa perhatian (*concern*) yang didefinisikan secara subyektif dan ada hubungannya dengan alam/lingkungan (*nature*), praktik, atau masyarakat yang berinteraksi dengannya
- c. Tindakan diproduksi melalui “deliberasi-deliberasi (pertimbangan) refleksif” yang dimiliki subyek yang mana hal tersebut menentukan proyek-proyek praktis (tindakan yang akan diambil tidak lagi berdasarkan “teori” atau cara yang biasanya dipahami secara kolektif, akan tetapi dikembangkan melalui apa yang sekiranya efektif untuk konteks yang baru) dalam hubungannya dengan keadaan obyektif mereka.

Refleksivitas terbagi ke dalam 4 bentuk, yang oleh Archer disebut sebagai “*mode(s) of reflexivity*”, di mana pembagian ini didasarkan oleh hubungan resiprokal antara “konteks” (yakni situasi sosial) dan “perhatian/*concern*”

(yakni hal yang menjadi perhatian subyek). 4 mode reflektivitas tersebut antara lain:

a. *Communicative reflexivity*

Merupakan reflektivitas yang muncul dari kesadaran bahwa subyek berada di situasi yang stabil (*contextual continuity*). Pemikirannya terbentuk oleh interaksi sosial—yang dapat dikatakan dijalin dengan “eksklusif”, yakni dengan sesama masyarakat dengan latar belakang serupa, menganut nilai-nilai yang serupa, biasa melakukan praktik-praktik yang serupa, dan yang juga sedang tidak mengalami guncangan keadaan⁴. Kondisi ini bukan sekadar karena mereka pasif dan menerima apa saja yang telah tersedia, akan tetapi reflektivitas yang mereka miliki mendorong mereka untuk memilih dari sekian pilihan, dan mereka memilih apa yang bagi mereka “familiar” dan “dijamin” oleh orang-orang di sekitar mereka. Demikian juga yang mengakibatkan kuatnya ikatan relasi antar sesama serta—dalam tahap ekstrem—sikap “anti” perubahan, menurut Archer hal ini bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh struktur yang membatasi mereka dengan sengaja melalui pemberlakuan norma, melainkan mode reflektivitas inilah yang tengah berlangsung dalam benak subyek.

b. *Autonomous reflexivity*

Merupakan mode reflektivitas di mana subyek berusaha untuk sepenuhnya memikirkan, merefleksikan, dan melakukan sesuatu tanpa konsultasi dengan pihak lain. Mereka mengetahui apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mereka, dan mereka berfokus untuk mencapai hal tersebut. Berkebalikan dengan *communicative reflexive*, subyek biasanya memiliki pengalaman pernah menghadapi guncangan dalam dunia sosial mereka (*contextual discontinuity*) yang harus ia

⁴ Archer menyebutnya sebagai “*interlocutors*”—secara harfiah diartikan sebagai “teman berbincang”. Bisa mengacu kepada pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan subyek atau kelompok di mana subyek menjalani kehidupan sosialnya secara lebih intens (*in-group*).

hadapi dan pahami tanpa bantuan dan sumbangan pikiran dari orang di sekitarnya. Subyek yang sedang dalam mode refleksivitas ini biasanya menjadi pribadi yang otonom, individualis, dan cenderung memandang hubungan sosial dari manfaatnya untuk keperluan/pencapaian tujuan pribadi mereka.

c. *Meta-reflexivity*

Hampir sama seperti *autonomous reflexive*, mode refleksivitas ini minim atau tidak melibatkan penilaian dari pihak lain. Namun, jika mode refleksivitas yang sebelumnya berfokus untuk pencapaian tujuan, maka dalam melakukan *meta-reflexive* subyek sedang mencari dan menentukan tujuan itu sendiri dan bagaimana mereka menjadikannya sebuah prioritas. Subyek mencari hal-hal seperti peran sosialnya di masyarakat yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Subyek dengan mode refleksivitas ini mengevaluasi kembali refleksivitasnya sendiri, baik yang telah tercermin dalam tindakan maupun dalam pemikiran.

d. *Fractured reflexivity*

Mode refleksivitas ini terjadi ketika proses berpikir secara internal gagal memberikan solusi yang membuat subyek dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka dan apa tindakan yang harus mereka ambil. Terjadi sebuah perubahan konteks secara tiba-tiba dan masyarakat cenderung belum memiliki *concern* yang sesuai dengan konteks tersebut. Biasanya, mode refleksivitas ini dipicu oleh adanya kondisi tertentu seperti krisis. Refleksivitas ini menimbulkan ketakutan dan keengganan untuk bertindak.

Archer juga berargumen bahwa dunia modern menyiratkan sebuah masyarakat yang berubah-ubah dan akrab dengan perubahan itu sendiri. Konteks yang dijalani subyek senantiasa berubah, sehingga mode refleksivitas kebanyakan subyek dalam masyarakat modern bergeser ke mode yang cenderung ‘mandiri’ seperti *autonomous reflexive* maupun

meta-reflexive. Mobilitas masyarakat modern yang tinggi dan maraknya individualisme juga membuat *communicative reflexive* lebih jarang diterapkan (Archer, 2007). Namun, mode reflektivitas bukanlah cerminan kepribadian individu ataupun tipologi, melainkan merupakan sesuatu yang berlangsung sepanjang waktu selama individu melihat sekitarnya dan harus memberi respon terhadapnya, dengan deliberasi/pertimbangan yang bisa berbeda-beda di setiap tahap kehidupan dan situasi-kondisi.

Dunia modern dengan ciri khas perubahannya membuat masyarakat hidup dalam sebuah diskontinuitas kontekstual, yakni perubahan berupa guncangan/disrupsi yang terjadi dalam dunia sosial mereka yang tidak bisa lagi dihadapi oleh cara-cara yang pernah digunakan dan efektif untuk konteks yang sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Archer, hubungan antara struktur dan agensi tergantung kepada pemikiran seseorang terhadap kondisi sosialnya (Wiley, 2005), sebab individu sebagai agen adalah pihak yang memiliki reflektivitas dan berikutnya akan menentukan tindakan mereka yang selanjutnya akan menghasilkan elaborasi antara kondisi struktural dengan agen/masyarakat yang menjadi bagiannya. Individu/kelompok masyarakat sebagai agen dapat mengenal dan menjadi semakin ‘terbiasa’ dengan kondisi yang mereka hadapi dan mengevaluasinya, serta menciptakan strategi adaptasi berdasarkan apa yang menurut pandangan mereka (berkaitan dengan nilai, prioritas, dan tujuan) paling penting untuk diwujudkan.

1.4. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengungkap kondisi yang ada di lapangan sesuai dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki informan. Teori sosiologi digunakan sebagai pisau analisis setelah data terkumpul. Metode kualitatif mengacu pada cara melakukan penyelidikan sosiologis menggunakan praktik empiris seperti observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara mendalam atau

observasi partisipan untuk mendapatkan gambaran rinci tentang populasi yang mereka selidiki. Penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel karena dalam studi ini mendukung spontanitas dan adaptasi interaksi antara peneliti dan partisipan. Fleksibilitas ini dapat dilihat dari penggunaan pertanyaan terbuka yang mendorong partisipan merespons dengan bebas sesuai dengan bahasa mereka. Artinya, respons yang diperoleh tidak hanya sebatas jawaban “ya” atau “tidak”, sehingga metode ini sangat mendukung penerapan pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan orang-orang dan fenomena yang mereka amati (Becker, 1996). Menurut Suyanto (2015), penelitian kualitatif melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat ganda yang berasal dari hasil konstruksi, tidak bebas nilai, dan data dikumpulkan dengan prosedur yang fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian dan Setting Sosial

Penelitian dilakukan di lingkungan Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya⁵. Dengan dilakukannya proses penelitian langsung di lokasi bandara, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan setting sosial dengan lebih tepat dan rinci, serta utamanya dapat memberikan gambaran yang mendekati realita yang dihadapi oleh pekerja *outsourcing*. Bandar udara Juanda terpilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan salah satu bandara di Indonesia yang mengalami penurunan jumlah penerbangan serta intensitas aktivitas pekerja yang drastis, karena sebelumnya memiliki banyak destinasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (misalnya Singapura, Hongkong, Jeddah, dan berbagai lokasi lainnya).

⁵ Secara geografis dan administratif, Bandara Juanda terletak di Kabupaten Sidoarjo. Hal serupa terdapat juga di berbagai bandara, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta yang secara “formalitas” disebut sebagai wilayah Jakarta meski berlokasi di Cengkareng, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kondisi Bandara Juanda yang pada pertengahan 2022 (ketika dilakukan pengumpulan data di lapangan) telah mengalami pemulihan akan tetapi masih menerapkan kebijakan protokol kesehatan menjadi setting sosial dari penelitian ini. Kondisi yang dianggap pulih tersebut dipertimbangkan berdasarkan sudah dilonggarkannya beberapa protokol (misalnya pembatasan antrian tertentu dan dapat memasuki area bandara tanpa mencuci tangan), bertambah banyaknya pengunjung serta pekerja, dan semakin banyaknya gerai/pertokoan dalam bandara yang dibuka kembali. Meskipun sudah mulai terlihat banyak pengunjung di bandara—terkhusus Terminal 1 Domestik—menurut informasi dari para pegawai bandara (beberapa staf dan *supervisor*), jumlah penerbangan belum naik secara signifikan, sehingga ada kalanya terjadi penggabungan penerbangan dari 2 jadwal yang berbeda. Terlebih lagi di Terminal 2 Internasional Bandara Juanda yang masih dapat dikatakan hampir sepenuhnya kosong (kecuali petugas yang berjaga dan berkeliling), dan baru terlihat ada pengunjung ketika ada keberangkatan atau kedatangan pesawat.

C. Subyek Penelitian

Subyek (informan) pada penelitian kali ini adalah pekerja *outsourcing* di bandar udara yakni mereka yang bekerja di pasasi atau *ground-handling*, baik di terminal domestik maupun terminal internasional. Pemilihan informan yang diutamakan dalam penelitian ini sehubungan dengan tema yang diteliti, yakni pegawai *outsourcing* yang bekerja ketika pandemi COVID-19 sedang berlangsung, kebijakan yang berlaku karenanya masih diterapkan, dan kehidupan pegawai tersebut terkena dampak yang signifikan karenanya.

Subyek/informan penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*). Teknik ini dipilih ketika suatu penelitian berusaha menjelaskan dan menggali mengenai sesuatu secara luas, daripada membuat suatu generalisasi (Dawson, 2002). “Kesengajaan” tersebut tentu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan peneliti tentang 1.) keberagaman latar belakang (khususnya dalam topik ini adalah jenis kelamin, usia, pengalaman/lama bekerja, status pernikahan, jumlah anak dan tanggungan lain yang dimiliki); 2.) pengetahuan, baik tentang pekerjaan

yag dilakukan maupun tentang kondisi yang tengah dihadapi (dalam halini adalah pandemi), serta kebijakan yang muncul/berubah karenanya; dan 3.) kebersediaan/*consent* dari individu yang ditawarkan untuk menjadi subyek penelitian, yang dikonfirmasi melalui sebuah surat yang ditandatangani.

Awalnya, penentuan subyek juga didasarkan kepada divisi dan penerbangan apa (domestik atau internasional) yang ditangani, dengan alasan keberagaman data seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, hal ini tidak lagi menjadi patokan karena staf Bandara Juanda kini dipanggil bekerja secara *on-call*, yang juga menentukan divisi apa yang akan mereka tangani pada hari itu serta di terminal apa mereka dipekerjakan. Variasi latar belakang subyek akhirnya ditentukan dengan patokan yang telah dijabarkan di atas dan didapatkan 5 pegawai *outsourcing* yang dianggap dapat menjadi subyek penelitian, dengan latar belakang yang beragam dan komposisi yang mewakili beragam kondisi dari masing-masing latar belakang. Bahkan, salah satu informan memiliki pengalaman sempat di-PHK oleh perusahaan yang sama sehingga hal ini dapat menambah pandangan dari sisi yang pernah menjadi korban PHK yang sempat terjadi secara besar-besaran di Bandara Juanda.

Subyek penelitian didapatkan dengan cara yang beragam; dimulai ketika peneliti melakukan proses observasi sambil mulai mendekati beberapa pegawai (tetap dan *outsourcing*) di hari pertama di lapangan agar dapat mulai berkenalan, memohon izin untuk melakukan penelitian (setelah mendapat izin formal dari perusahaan yang menaungi pegawai-pegawai tersebut), serta mendapat gambaran mengenai pekerjaan subyek secara sekilas/tampak luar. Di hari tersebutlah peneliti diarahkan oleh seorang pegawai tetap kepada beberapa pegawai *outsourcing* yang kemudian peneliti pilih dengan menyebutkan kriteria/latar belakang yang diminta. Di hari lainnya, peneliti juga diarahkan oleh subyek yang telah diwawancarai untuk mewawancarai pegawai *outsourcing* lain yang diyakini subyek tersebut mumpuni untuk menjadi subyek penelitian. Semua informan disosialisasikan terlebih dahulu mengenai penelitian yang akan dilakukan dan serta apa saja hal lain yang harus mereka ketahui (misalnya bahwa

nama mereka akan disamarkan, mereka berhak menolak menjawab pertanyaan, dan kesepakatan lainnya).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam cocok untuk melakukan pengumpulan data dalam berbagai metodologi penelitian, termasuk *grounded theory* dan etnografi, dan sering digunakan sebagai metode pengumpulan data yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada pendekatan filosofis yang mendasarinya. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara kualitatif dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 2014). Oleh karena itu, pertanyaan yang kaku harus dihindari (Marshall dan Rossman, 1989 dalam Suyanto, 2015) dan disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih umum atau yang dapat ditangkap oleh partisipan. Teknik pengumpulan data ini dipilih sebagai teknik yang paling sesuai dengan tema penelitian ini yang hendak “mengungkap” pengalaman dari informan, di mana hal ini paling efektif dilakukan dengan wawancara mendalam yang cenderung fleksibel tanpa batas-batas yang terlalu ketat layaknya teknik seperti survei atau kuesioner yang diterapkan dalam metode kuantitatif. Teknik wawancara mendalam juga mendukung adanya pertanyaan tambahan yang muncul dari jawaban awal informan—hal ini akan menambahkan kekayaan jawaban dan akan mendukung analisis yang semakin akurat.

2. Observasi

Dalam melakukan pengamatan, peneliti juga akan melakukan kegiatan pencatatan dan perekaman mengenai setting sosial yang sedang berlangsung. Aspek-aspek pokok yang akan diperhatikan dan dimasukkan sebagai data meliputi 1.) Kepadatan penumpang (baik di hari Senin-Jumat maupun akhir pekan/Sabtu-Minggu); 2.) Penerapan regulasi yang berkaitan dengan protokol kesehatan (baik oleh pengunjung/calon penumpang maupun pekerja di bandara); 3.) Aktivitas kerja pekerja di bandara

(terkhusus staf yang seluruhnya adalah tenaga *outsourcing*) di berbagai divisi yang ada (konter *check-in*, pintu keberangkatan, pelayanan kehilangan barang, penertiban penumpang, dan pengerjaan dokumen-dokumen); dan 4.) Aktivitas pekerja di bandara (terkhusus staf yang seluruhnya adalah tenaga *outsourcing*) ketika sedang beristirahat (belum memasuki waktu persiapan keberangkatan/kedatangan, atau sekadara berjaga).

Teknik observasi akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kondisi lapangan yang diteliti. Baik data yang diperoleh dari wawancara maupun observasi akan melengkapi satu sama lain; observasi akan memberi data berupa setting sosial yang dihadapi subyek penelitian, perbandingan dengan jawaban partisipan penelitian, atau hal-hal yang mungkin belum tersampaikan oleh partisipan, sementara wawancara mendalam akan dapat menjelaskan hal-hal yang didapati dari proses observasi secara lebih lanjut.

3. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari luar data yang dikumpulkan oleh peneliti (data primer) yang berguna untuk mendukung data primer yang ada. Data ini digunakan untuk perbandingan, menemukan topik/pertanyaan penelitian baru, bahkan mengembangkan penelitian yang ada dalam data tersebut lebih lanjut (McGinn dalam Given, 2008). Data sekunder dapat berupa riset terdahulu, statistik, berita, teks berisi kebijakan publik, dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dapat dilakukan melalui 3 tahap menurut Miles dan Huberman (1994). Proses tersebut terdiri dari antara lain:

1. Reduksi data

Mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data dalam catatan lapangan atau transkrip

tertulis. Data direduksi karena tidak semua hal yang didapatkan dari proses wawancara dan observasi dapat digolongkan sebagai “temuan” dan dijadikan bahan analisis. Terlebih, teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif melalui proses wawancara seringkali membuka ruang bagi informan untuk berbagi mengenai pengalaman dan perspektif yang dimilikinya seluas-luasnya hingga bahasan yang di luar tujuan dan konteks dari penelitian yang dilakukan. Melalui proses ini, bahasan penelitian dapat menjadi lebih terfokus dan memiliki arah yang jelas. Hasil rekaman wawancara akan ditranskripsikan (diketik ulang) dan setiap jawaban akan dipilah. Jawaban yang dipilah kemudian dimasukkan ke dalam matriks yang mempermudah peneliti mengkategorisasikan setiap jawaban serta mencari kata kunci (yang kemudian diberi *highlight*).

2. Penyajian data

Mengacu pada proses penyusunan data yang telah dianggap sesuai ke dalam teks narasi. Beberapa pernyataan informan yang dianggap dapat memberi gambaran lebih mengenai jawaban tertentu dikutip secara langsung.

3. Penarikan kesimpulan

Mengacu pada proses peringkasan dan penekanan kepada hal-hal pokok yang didapatkan dari hasil penelitian.